

**DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN (PIIP) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

**Athina Miftahul Jannah**



**EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN**

**OLEH**

**ATHINA MIFTAHUL JANNAH**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pembangunan jalan, drainase, dan talud terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Data yang digunakan digunakan adalah data sekunder. Analisis yang digunakan adalah model regresi berganda OLS (Ordinary Least Square Method) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel pembangunan jalan, drainase, dan talud berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran. Secara parsial variabel pembangunan jalan dan drainase berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pesawaran, sedangkan variabel talud berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran .

**Kata Kunci :** Pertumbuhan Ekonomi, pembangunan drainase, pembangunan jalan, pembangunan talud

## **ABSTRACT**

### ***IMPACT OF RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAM (PIIP) ON ECONOMIC GROWTH IN THE DISTRICT COMMUNITY PESAWARAN***

***BY  
ATHINA MIFTAHUL JANNAH***

*This study aimed to analyze the effect of variable construction of roads, drainage, and embankments towards economic growth in the District Pesawaran. The data used is secondary data. The analysis used is multiple regression model OLS (Ordinary Least Square Method). The results of this study indicate that jointly variable construction of roads, drainage, and embankments positive and significant impact on economic growth in the District Pesawaran. In partial construction of roads and drainage positive and significant impact on economic growth in the District Pesawaran, while variable talud but not significant positive effect on economic growth in the district Pesawaran.*

***Keywords:*** *Economic Growth, drainage construction, construction of embankments, road building*

**DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
PERDESAAN (PIIP) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN**

**Oleh  
Athina Miftahul Jannah**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA EKONOMI  
pada  
Jurusan Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2016**

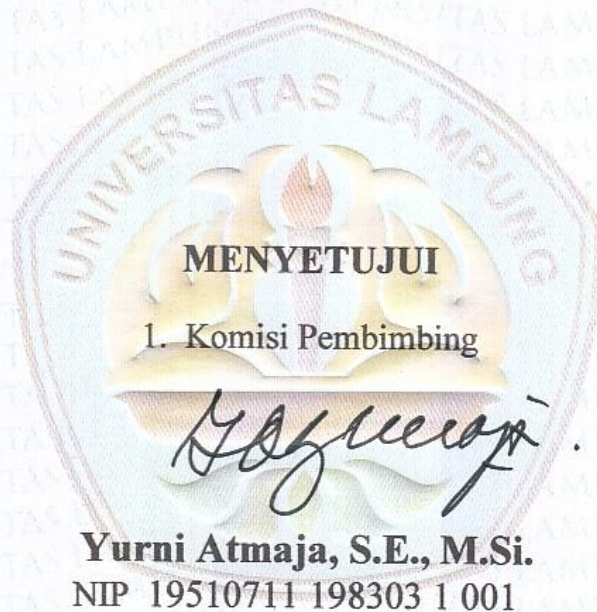
Judul Skripsi : **DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP)  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : *Athina Miftahul Jannah*

No. Pokok Mahasiswa : **1211021016**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

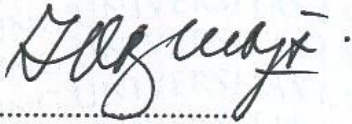
*[Signature]*  
**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP 19660621 199003 1 003



**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Yurni Atmaja, S.E., M.Si.**

  
.....

Penguji

Bukan Pembimbing : **Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.**

  
.....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 196109041987031011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku”.

Bandar Lampung, 23 Juni 2016

Penulis



Athina Miftahul Jannah

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Kendari pada Tanggal 8 Juli 1994. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersauda, dari pasangan Bapak Mujutahid Hidayat dan Ibu Indah Stannia.

Penulis memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar di SDN Kuncup Pertiwi Kendari, Sulawesi Tenggara dan pada kelas 2 SD pindah ke SDN Teladan dan menyelesaikannya pada Tahun 2006. Kemudian, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 5 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2009 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2012.

Pada Tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada Juli 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Qencono Kabupaten Lampung timur selama 60 hari.



## **MOTTO**

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula .

(QS. Al-Isra': 7).

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh .

(Confusius)

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan terima kasihku kepada :

Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Mujutahid Hidayat dan Ibu Indah Stannia, terima kasih atas kasih sayang, doa, semangat, dukungan, kesabaran, ketulusan, perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membalas dan menggantikannya.

Para Dosen yang telah berjasa memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga melalui ketulusan dan kesabaranmu.

Sahabat-sahabat tercinta yang turut memberikan saran, motivasi, bantuan dan juga doa yang dapat menambah semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Almamater tercinta. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

## SANWACANA

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ DAMPAK PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, dan bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati sebagai wujud rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E.,M.Si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Bapak Yurni Atmaja, S.E.,M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam proses pengusunan skripsi ini hingga akhir kepada penulis.
5. Ibu Zulfa Emalia, S.E.,M.Sc selaku dosen penguji yang telah memberikan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Moneyzar Usman, S.E.,M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku tercinta Mama dan Papa. Terima kasih atas doa, dukungan, motivasi dan segalanya yang telah diberikan kepadaku .
9. Kakak ku Ilman Suryaman dan Adik ku Ahimsa Adi Mulya, Terimakasih atas doa,dukungan dan semangat yang selalu diberikan selama ini.
10. Orang terkasih dan terdekat ku Yogi Febrian Putra,S.H. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, motivasi, doa, dukungan dan selalu ada di saat masa-masa sulit.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Dede Supriyanto, Almira, Bella Vanessa dan Devina Octarrum, susah dan senang telah kita lalui berrsama dan terima kasih atas motivasi, bantuan, semangat, dan kebaikan lainnya yang telah diberikan selama ini.
12. Teman-teman tersayang Gepe ku yang dari SMA melewati masa sulit bersama , Sella Saptarani, Bella Vanessa, dan Dhira Widya Prasya terima kasih atas semangat,doa dan dukungannya .

13. Sahabat-sahabat KKN terbaik Tanjung Qencono, Ayu, Tasya, Aul, Rama, Fajar dan Rifki terima kasih selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan, doa dan semua kebaikan yang kalian berikan.
14. Teman SD ku, Putri Dwi Lestary yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan.
15. Teman-teman SMP ku, Winny Maylani dan Bella Seftiani terima kasih banyak telah memberi banyak dukungan dalam penelitian ini.
16. Guru terbaikku Ria Pujianti, Terimakasih sudah senantiasa memberi ilmu, semangat, doa dan dukungannya selama ini.
17. Teman-teman Ekonomi Pembangunan 2012i Handicky, Gerry, Sony, Ageng, Rayan, Nijar, Pirda, Depa, Vivi, Aprida, Epsi, Boli, Julian Riano, Deri, Meri, Dewi, dan Adib serta seluruh teman EP' 12 yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan yang ada.
18. Seluruh staf administrasi Ibu Hudayah, Mas Feri, Pak Kasimdan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang selama ini sangat membantu kelancaran skripsi ini.
19. Almamater tercinta Universitas Lampung.
20. Berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih.



Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis,

**Athina Miftahul Jannah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR GAMBAR .....	IV
DAFTAR LAMPIRAN .....	V
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Pemikiran .....	10
F. Hipotesis .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSAKA</b>	
A. Pengertian PPIP .....	14
B. Pengertian Dan Peranan Jalan .....	17
C. Pengertian Drainase .....	21
D. Pengertian Talud .....	25
E. Pengertian Perdesaan .....	25
F. Pemberdayaan Masyarakat .....	27
G. Pertumbuhan Ekonomi .....	33
H. Tinjauan Empiris .....	39
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Dan Sumber Data .....	42
B. Definisi Operasional Variabel .....	43
C. Model Dan Metode Analisis .....	44
D. Uji Asumsi Klasik .....	45
1. Uji Normalitas .....	45
2. Uji Heteroskedastisitas .....	46
3. Uji Autokorelasi .....	47
4. Uji Multikolinearitas .....	48
E. Pengujian Hipotesis .....	49
1. Uji t statistik .....	49

2. Uji F .....	50
F. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	51

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .....	53
1. Perkembangan PDRB di Kabupaten Pesawaran .....	53
2. Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Pesawaran .....	54
3. Pembangunan Drainase di Kabupaten Pesawaran .....	55
4. Pembangunan Talud di Kabupaten Pesawaran .....	56
B. Hasil Perhitungan Regresi .....	57
C. Uji Asumsi Klasik .....	58
1. Uji Normalitas .....	59
2. Uji Heteroskedastisitas.....	59
3. Uji Autokorelasi .....	60
4. Uji Multikolinieritas.....	61
D. Pengujian Hipotesis .....	62
1. Uji t Statistik .....	62
2. Uji f Statistik .....	63
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	64
1. Pembahasan .....	64
2. Interpretasi Hasil Regresi .....	64
3. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesawaran.....	65
4. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Drainase Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesawaran .....	66
5. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Talud Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesawaran.....	67

#### **V. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1976-2011 . . . . .	2
2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesawaran Tahun 2009-2010 (Juta Rupiah/bulan) . . . . .	4
3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013. . . . .	6
4. Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Pesawaran (Km) 2008-2010 . . . . .	19
5. Panjang Pembangunan Jalan Di Kabupaten Pesawaran (m) 2009-2011. . . . .	21
6. Variabel Dan Simbol Yang Digunakan . . . . .	43
7. Data PDRB di Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 – 2015 (Milyar Rupiah) . . . . .	52
8. Data Panjang Pembangunan Infastruktur Jalan di Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 - 2015 (m) . . . . .	53
9. Data Panjang Pembangunan Drainase di Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 - 2015 (m) . . . . .	54
10. Data Panjang Pembangunan Talud di Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 - 2015 (m) . . . . .	55
11. Hasil Perhitungan Regresi . . . . .	56
12. Hasil Uji Normalitas . . . . .	58
13. Hasil Uji Heteroskedastisitas . . . . .	59
14. Hasil uji Autokorelasi . . . . .	60
15. Hasil Uji Multikolinieritas . . . . .	60
16. Uji t Statistik Dengan Tingkat Kepercayaan 95% . . . . .	61
17. Hasil Uji F Statistik Dengan Tingkat Kepercayaan 95% . . . . .	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pemikiran .....	12
2. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pesawaran .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. PDRB Pesawaran Menurut Harga Konstan Tahun 2009-2015 . . . . .	L1
2. Data Pembangunan Jalan , Drainase dan Talud Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2009 . . . . .	L4
3. Data Pembangunan Jalan , Drainase dan Talud Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 . . . . .	L5
4. Data Pembangunan Jalan , Drainase dan Talud Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 . . . . .	L6
5. Data Pembangunan Jalan , Drainase dan Talud Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 . . . . .	L8
6. Data Pembangunan Jalan , Drainase dan Talud Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 . . . . .	L10
7. Data Pembangunan Jalan , Drainase dan Talud Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 . . . . .	L12
8. Data Pembangunan Jalan , Drainase dan Talud Di Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 . . . . .	L15
9. Hasil Regresi . . . . .	L17
10. Hasil Uji Normalitas . . . . .	L18
11. Hasil Uji Heteroskedstisitas . . . . .	L19
12. Hasil Uji Autokorelasi . . . . .	L20
13. Hasil Uji Multikolinieritas . . . . .	L21
14. Tabel T . . . . .	L22
15. Tabel F . . . . .	L24
16. Tabel Chi Square . . . . .	L26

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang di dunia dan masih menghadapi berbagai permasalahan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Salah satu masalah yang sulit diatasi oleh pemerintah hingga saat ini adalah kemiskinan. Kemiskinan mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat seperti aspek sosial, budaya, lingkungan, dan spiritual. Oleh sebab itu, sering kali program penganggulangan kemiskinan menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat. Menurut Randy (2006), kemiskinan merupakan masalah multisektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak dari tingkat kementerian/lembaga sampai pada tingkat individu masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tabel 1 menunjukkan perkembangan garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1976 sampai Maret 2011. Terlihat dalam Tabel 1 bahwa jumlah penduduk miskin di kota dan desa mengalami fluktuasi. Namun dalam naiknya persentase penduduk miskin, terlihat jelas bahwa jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak daripada di kota.

Terlihat dari tahun 1976 hingga awal 1996, penduduk miskin di kota dan desa terus menurun. Tingkat kemiskinan di kota pada tahun 1976 sebesar 38,80% menjadi 9,70% pada awal tahun 1996, di desa turun dari 40,40% menjadi 12,30% dalam periode waktu yang sama. Setelah itu, dari pertengahan tahun 1996 sampai Maret 2011, semakin terlihat naik dan turunnya persentase penduduk miskin baik di kota maupun di desa.

Tabel 1. Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1976-2011 (milyar rupiah)

Tahun	Garis Kemiskinan(Rp)		Penduduk Miskin (juta)		Penduduk Miskin (%)	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
1976	4.522	2.849	10	44,2	38,8	40,4
1980	6.831	4.449	9,5	32,8	29	28,4
1984	13.731	7.746	9,3	25,7	23,1	21,2
1990	20.614	13.295	9,4	17,8	16,8	14,3
1996	38.246	27.413	7,2	15,3	9,7	12,3
1996	42.032	31.366	9,42	24,59	13,39	19,78
2000	91.632	73.648	12,3	26,4	14,6	22,38
2005	150.799	117.259	12,4	22,7	11,68	19,98
2010	232.989	192.354	11,1	19,93	9,87	16,56
Mar-11	253.016	213.395	11,05	18,97	9,23	15,72

Sumber: BPS, 2011

Dari tahun 1976 sampai Maret 2011, Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang paling tinggi untuk kota sebesar 38,80% dan desa sebesar 40,40% terjadi pada tahun 1976. Sedangkan tingkat kemiskinan paling rendah untuk kota pada Maret 2011 yaitu sebesar 9,23%, dan untuk desa pada awal tahun 1996 yaitu sebesar 15,72%. Hal ini mengindikasikan bahwa penanggulangan kemiskinan di perkotaan relatif lebih berhasil daripada di pedesaan.

Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional. Selain Provinsi Lampung, khususnya untuk wilayah Sumatera,

provinsi lain yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional yaitu Aceh, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Sedangkan untuk provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan dua kali lipat dari rata-rata nasional (13,33 persen) adalah Papua sebesar 36,80 persen, Papua Barat 34,88 persen dan Maluku sebesar 27,74 persen. Diungkapkan Direktur Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prasetyono Widjojo, krisis ekonomi pada 1998 adalah faktor utama yang membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat secara drastis dari angka 22,5 juta penduduk miskin pada 1996, menjadi 49,5.

Data Bappenas menyebutkan, kemiskinan di Indonesia cukup besar dan tidak merata. Dari 31,02 juta penduduk yang hidup miskin, sebagian besarnya (55,83 persen) menetap di Pulau Jawa. Pulau Jawa menempati peringkat pertama disusul Sumatera dengan prosentase kemiskinan 21,44 persen dari total 31 juta penduduk miskin.

Sedangkan Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan peringkat ketiga, keempat dan kelima. Satu hal yang masih menjadi sorotan adalah ditemukan indeks kedalaman kemiskinan yang masih ditemukan tinggi di beberapa daerah, yakni Papua Barat dengan indeks 11,52, Papua 11,51, Maluku 6,94, Gorontalo 6,26, Aceh 4,87, Sulawesi Tengah 4,8, Yogyakarta 4,74 dan Nusa Tenggara Timur 4,47.

Tabel 2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesawaran Tahun 2009-2011 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011
Pertanian	824.951,67	859.996,8	903.979,6
Pertambangan dan penggalian	4.536,24	4.635,04	4.742,83
Indusrti pengolahan	294.895,3	211.058,56	226.203,03
Listrik dan air bersih	2.900,82	1.978,94	2.061,27
Bangunan	200.532,99	103.675,7	107.808,75
Perdagangan restoran dan hotel	264.708,1	285.246,58	308.389,11
Angkutan dan komunikasi	36.428,4	80.283,65	94.306,78
Keuangan persewaan dan jasa perusahaan	28.444,61	31.355,25	24.369,09
Jasa- jasa	129.416,62	139.625,24	151.739,35
PDRB	5.575.814,76	7.120.991,77	7.513.109,81

Sumber : BPS pesawaran,2013

Tabel 2 menjelaskan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pesawaran Tahun 2009-2011. Dimana pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel di atas , seperti pada tahun 2009 dari angka 5.575.814,76 lalu mencapai angka 7.513.109,81 pada tahun 2011. Peningkatan PDRB tertinggi pada tahun 2009 menuju tahun 2010 , dimana peningkatan yang terjadi sebesar 1.545.177,01 .

Dari Tabel.3 terlihat bahwa sector pertanian sebesar 4,50% ,sector pertambangan dan penggalian 3,68%, industry pengolahan migas 8,85% , listrik dan air bersih 8,51%, bangunan 2,93% , perdagangan dan hotel 5,46%, pengangkutan dan komunikasi 9,52%, keuangan 4,24% , persewaan dan jasa perusahaan 4,86% .

Berdasarkan tempat tinggal, penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,62 persen atau 911,53 ribu jiwa, cukup jauh bila dibandingkan dengan kemiskinan perkotaan sebesar 10,89 persen atau 222,75 ribu jiwa.



Melalui rangkaian program pengembangan, masyarakat bisa belajar banyak mengenai kelembagaan, kepemimpinan, jaringan, dan manajemen komunitas sehingga menjadikan mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pembangunan dan memiliki posisi tawar yang lebih besar dalam hubungannya dengan pihak lain di luar komunitasnya.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan memfokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta peningkatan kapasitas stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan PPIP juga diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya dengan menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Dari uraian di atas, kiranya menarik untuk diamati apakah proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pesawaran dapat mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten tersebut .

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung  
Tahun 2009 – 2013

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Lampung Barat	19,13	17.12	15,99	15,13	13,96
Tanggamus	19,79	18.30	17,06	16,1	15,24
Lampung Selatan	22,83	20.61	19,23	18,19	17,09
Lampung Timur	20,86	21.06	19,66	18,59	17,38
Lampung Tengah	18,67	16.88	15,76	14,96	13,37
Lampung Utara	28,96	28.19	26,33	25,16	23,67
Way Kanan	20,92	18.81	17,63	16,54	15,36
Tulang Bawang	10,48	10.80	10,11	9,43	8,04
Pesawaran	22,73	20.48	19,06	18,01	17,86
Pringsewu	-	12.45	11,62	11,01	9,81
Mesuji	-	8.65	8,07	7,69	5,81
Tulang Bawang Barat	-	7.63	7,11	6,73	6,31
Pesisir Barat	*	*	*	*	*
Bandar Lampung	14,39	14.58	13,61	12,65	10,85
Metro	15,07	13.77	12,9	12,09	11,08
<b>Lampung</b>	<b>20.22</b>	<b>18,94</b>			

sumber : BPS Provinsi Lampung

Dari Tabel 3 terlihat bahwa dari tahun 2009-2010 penurunan persentase penduduk miskin di kabupaten pesawaran sebesar 2,25% . Pada tahun 2010-2011 penurunan persentase penduduk miskin di kabupaten pesawaran sebesar 1,42% . Pada tahun 2011-2012 penurunan persentase penduduk miskin di kabupaten pesawaran sebesar 1,05% . Pada tahun 2012-2013 penurunan persentase penduduk miskin di kabupaten pesawaran sebesar 0,15% . Penurunan presentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010 yaitu sebesar 2,25% dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2012-1013 yaitu sebesar 0,15% .

Nilai PDRB dari tahun 2009-2011 terus meningkat (berdasarkan tabel 2) hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini relatif baik, demikian juga presentase penduduk miskin di pesawaran (berdasarkan tabel 3) terus menurun

tetapi dibandingkan daerah otonomi baru seperti mesuji , pringsewu dan tulang bawang presentase penduduk miskin di pesawaran masih terbilang tinggi .

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP) merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan memfokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta peningkatan kapasitas stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan PPIP juga diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya dengan menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.

Dalam pelaksanaannya PPIP ini lebih berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PPIP berada dibawah payung PNPM Mandiri, yang dalam kegiatannya meliputi fasilitas dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

Pertumbuhan Ekonomi masyarakat di Kabupaten Pesawaran mempunyai Tiga sektor yang sangat berperan dan mendominasi laju perekonomian Kabupaten Pesawaran di antaranya, pertanian, kehutanan dan perikanan dan industri pengolahan .

Di mana pertanian menyumbang 44,76 persen, disusul industri pengolahan 14,54 persen, dan perdagangan 12,80 persen .

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Pesawaran sepanjang 2009 sampai 2011 berjalan kurang baik. Pesawaran pernah dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh perlambatan ekonomi skala nasional, serta perlambatan ekonomi di Provinsi Lampung. Ini juga dikarenakan terjadinya kemarau panjang serta banyaknya alih fungsi lahan dibanding dengan kabupaten/kota lain.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawaran masih tergolong terbelakang bila dibandingkan dengan daerah-daerah otonom baru. Bahkan pertumbuhan ekonomi mesuji lebih tinggi dari Kabupaten Pesawaran yang sesama daerah otonomi baru.

Dari uraian di atas, kiranya menarik untuk diamati apakah proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pesawaran dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomian masyarakat di Kabupaten tersebut .

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh variabel infrastruktur jalan, infrastruktur drainase, dan infrastruktur talud terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh variabel infrastruktur jalan, infrastruktur drainase, dan infrastruktur talud terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian seperti telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur drainase, dan pembangunan infrastruktur talud terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur drainase, dan pembangunan infrastruktur talud terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan .

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- A. Untuk menambah pemahaman dan alasan serta lebih mendukung teori- teori yang telah ada berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- B. Sebagai bahan referensi bagi ilmu-ilmu ekonomi, khususnya bidang economic development

C. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti yang lain.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan tentang implementasi program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan model kebijakan pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

1. Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang yang berkelanjutan
2. Peningkatan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat dan kelompok dengan penghasilan kecil
3. Peningkatan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien
4. Program pengembangan dan pemberian pelayanan yang lebih efektif, efisien dan terfokus pelanggan
5. Proses pengembangan yang lebih demokratis
6. Pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat perdesaan tertinggal yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara

Pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Hal ini terjadi karena mereka tidak dapat menikmati pendidikan yang memadai. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

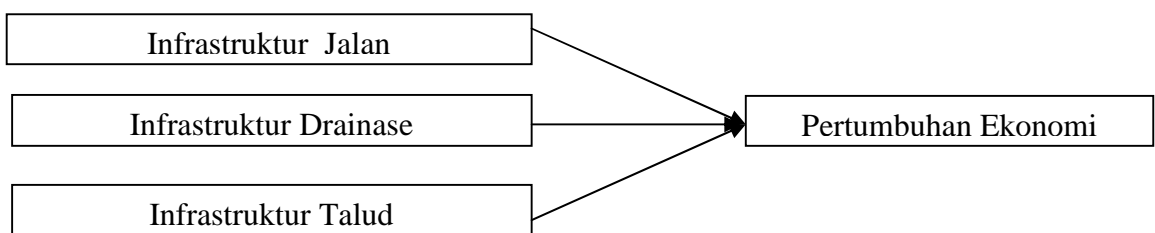
Terlihat secara spintas masyarakat sudah puas dengan hasil mereka, tetapi kenyataan yang sebenarnya masyarakat tidak sadar bahwa mereka masih dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dari saat ini.

Hasil penelitian Zaki Mubarak (2010), pelaksanaan PPIP di Kota Bandar Lampung, telah berhasil mengubah tingkat kesadaran masyarakat serta meningkatkan pemahamannya untuk berperan dalam pembangunan di komunitasnya.

Masyarakat telah menyadari konsep pemberdayaan dan mengerti untuk menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya, namun untuk menuju tahapan pembiasaan masih membutuhkan pembelajaran yang lebih banyak sehingga mereka benar-benar siap untuk bertanggung jawab secara penuh dalam pengelolaan pembangunan komunitasnya. Masyarakat juga telah siap untuk melanjutkan program pemberdayaan yang selama ini telah berjalan, meskipun secara mandiri hal tersebut belum dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dan masih membutuhkan pendampingan yang intensif dari pihak luar serta bantuan pendanaan secara kontinyu .

Alur yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Gambar 1 . Kerangka pemikiran





## **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran di atas , maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga variabel pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pesawaran .
2. Diduga variabel pembangunan infrastruktur drainase berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pesawaran .
3. Diduga variabel pembangunan infrastruktur talud berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pesawaran .

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulisan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

- Bab I :           Pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab II :           Tinjauan pustaka yang berisikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini
- Bab III :          Metode Penelitian yang berisikan tentang bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian
- Bab IV :          Hasil dan Pembahasan
- Bab V :          Simpulan dan Saran

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. PENGERTIAN PPIP**

PPIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan memfokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, peningkatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat serta peningkatan kapasitas stakeholders dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dana Bantuan langsung Masyarakat yang disalurkan melalui PPIP sebesar Rp 250 juta per desa, merupakan dana stimulan pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat desa sasaran untuk menjadi pendorong bagi peningkatan pembangunan infrastruktur dan perekonomian masyarakat desa, dengan memberikan peran yang besar kepadamasyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan serta memanfaatkan dan mengelolanya sendiri. Pelaksanaan PPIP juga diharapkan dapat membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan desanya dengan menyusun Usulan Prioritas Desa (UPD) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.

Penyelenggaraan program dilakukan secara berjenjang dan bertahap mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pemanfaatan dan pemeliharannya, dimana dalam setiap pelaksanaan melibatkan masyarakat secara luas terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan. Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat didampingi dan dibimbing oleh fasilitator dan tenaga ahli konsultan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan, serta Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Peran pemerintah daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya diharapkan dapat mendukung secara optimal penyelenggaraan PPIP ini dengan memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program dan koordinasi yang lebih optimal.

### **1. Latar Belakang PPIP**

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan, salah satunya adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang lebih dikenal dengan nama PPIP. Program ini sudah dimulai sejak 2007 sampai sekarang.

Program ini diharapkan bisa menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok sehingga mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan dan ketertinggalan yang ada didesanya.

Dalam pelaksanaannya PPIP ini lebih berbasis pada pemberdayaan masyarakat. PPIP berada dibawah payung PNPM Mandiri, yang dalam kegiatannya meliputi fasilitas dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan dan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar.

## **2. Tujuan PPIP**

Untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas kepelayanan infrastruktur dasar perdesaan, dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelolah pemerintahan yang baik. Akses disini adalah kemudahan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar.

## **3. Penguatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat**

Meningkatkan kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, melaksanakan, mengelolah dan memantau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar.

Penguatan dilaksanakan melalui :

- a. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/ pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan.
- b. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya serta kearifan local dalam pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai dengan karakteristik social, budaya dan geografis.

Prinsip-prinsip PPIP meliputi :

a. Dapat diterima (Acceptabel)

Maksudnya pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah desa sehingga dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

b. Transparansi

Penyelenggara kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat.

c. Akuntabel

Penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan masyarakat harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan dan mutu pekerjaan.

d. Berkelanjutan (Sustainable)

Penyelenggara kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya rencana pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur terbangun secara mandiri oleh masyarakat.

## **B. Pengertian dan Peranan Jalan**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan

mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga akan mendorong pengembangan semua sarana wilayah, pengembangan dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang.

Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Digunakan untuk kendaraan bermotor
2. Digunakan oleh masyarakat umum
3. Dibiayai oleh perusahaan Negara

### **1. Pengertian Kondisi jalan**

Kondisi jalan yang lancar merupakan ukuran yang dapat menggambarkan baik buruknya operasional lalu lintas berupa kecepatan, waktu tempuh (efisiensi waktu), kebebasan bermanuver, kenyamanan, pandangan bebas, keamanan dan keselamatan jalan.

Tingkat kelancaran dan keselamatan lalu lintas tersebut dipengaruhi oleh berapa faktor yaitu:

1. Kondisi kegiatan penduduk dan pola penggunaan lahan sekitar ruas jalan,
2. Kondisi persimpangan sepanjang jalan,

3. Kondisi trase jalan,
4. Kondisi volume lalu lintas
5. Kondisi kecepatan kendaraan.

Wewenang pengelolaan jaringan jalan dapat dikelompokkan menurut:

1. Jalan Nasional adalah Menteri Pekerjaan Umum (dulu Menteri Kimpraswil) atau pejabat yang ditunjuk;
2. Jalan Propinsi adalah Pemerintah Daerah atau instansi yang ditunjuk;
3. Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau instansi yang ditunjuk;
4. Jalan Kota adalah Pemerintah Daerah Kota atau instansi yang ditunjuk;
5. Jalan Desa adalah Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Jalan Khusus adalah pejabat atau orang yang ditunjuk.

**Tabel 4. Panjang Jalan Menurut Kondisi Di Kabupaten Pesawaran (Km)  
2008-2010**

Kondisi	2008	2009	2010
Baik	253,02	253,05	337,6
Sedang	39,19	39,22	22,74
Rusak	14,09	14,09	21,26
Rusak Berat	198,26	273,47	273,47

Sumber : Dinas PU Kabupaten Pesawaran

Dapat dilihat dari Tabel 4 bahwa Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2008 masih memiliki jalan yang rusak se-Panjang 14,09 km, kemudian pada tahun 2009 kondisi jalan rusak masih tidak mengalami perubahan. Lalu pada tahun 2010 kondisi jalan rusak meningkat menjadi 21,26km. Pada tahun 2010, kondisi jalan yang rusak berat di Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan yaitu dari 198,26 menjadi 273,47km.

## **2. Kondisi Infrastruktur di Kabupaten Pesawaran**

Kabupaten Pesawaran saat ini masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti pembangunan dan perekonomian. Pada bidang infrastruktur, pada saat ini masih sangat kurang, baru mencapai 56 persen, seperti pada pembangunan jalan, total panjang jalan kabupaten pesawaran adalah 782,957 kilometer, kondisi baik 443,594 kilometer atau 56,66 persen, kondisi rusak ringan 44,644 kilometer atau 5,70 persen, kondisi rusak berat 294,7197 kilometer atau 37,64 persen. Jumlah jembatan kabupaten pesawaran 59 buah dengan total panjang 1.083 m dan dalam kondisi rusak 19 buah dengan total panjang 373 meter. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten otonomi daerah baru seperti mesuji yang telah mengalami pelebaran jalan pada seluruh jalan utama dan jalan lingkungan yang telah disusul dengan pembangunan dua jalur di jalan-jalan utama di kabupaten mesuji yang mana pembangunan jalan dua jalur tersebut dilakukan pada 25 ruas jalan dengan total panjang 141 kilometer, lebar jalan dua jalur di atas 16 meter dengan median 1 meter. Apabila dibandingkan lagi dengan Kabupaten otonomi baru lainnya seperti pringsewu yang kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Pringsewu sebesar 23,93 persen dari total panjang jalan Kabupaten Pringsewu 1.222,51 kilometer, kondisi infrastruktur Kabupaten Pesawaran adalah yang terparah.



Tabel 5. Panjang Pembangunan Jalan Di Kabupaten Pesawaran  
(m) 2009-2011

Tahun	Pembangunan Jalan di Kabupaten Pesawaran (m)
2009	6670
2010	7380
2011	7615

Sumber : Dinas PU Kabupaten Pesawaran

Dapat dilihat dari Tabel 5 bahwa Kabupaten Pesawaran pada Tahun 2009 melakukan pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 6670 km , kemudian pada tahun selanjutnya , yaitu tahun 2010 pembangunan jalan di Kabupaten Pesawaran meningkat sebanyak 710m , yang sebelumnya pada tahun 2009 sepanjang 6670 km menjadi 7380m pada tahun 2010 . Lalu pada tahun selanjutnya , pembangunan jalan di Kabupaten Pesawaran ini mengalami peningkatan lagi , yaitu sebanyak 235m .

### C. Pengertian Drainase

Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Irigasi dan drainase merupakan bagian penting dalam penataan sistem penyediaan air di bidang pertanian maupun tata ruang.

Saluran drainase sering kali dirujuk sebagai drainase saja karena secara teknis hampir semua drainase terkait dengan pembuatan saluran. Saluran drainase permukaan biasanya berupa parit , sementara untuk bawah tanah disebut gorong-gorong di bawah tanah.

Dalam lingkup rekayasa sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu

kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingan. Dalam tata ruang, drainase berperan penting untuk mengatur pasokan air demi pencegahan banjir. Drainase juga bagian dari usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas.

Drainase juga dapat didefinisikan sebagai pembuangan air permukaan, baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Drainase perkotaan berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Oleh karena itu drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendali banjir kota dan lainnya.

Pengembangan permukiman di perkotaan yang demikian pesatnya justru makin mengurangi daerah resapan air hujan karena luas daerah yang ditutupi oleh perkerasan semakin meningkat dan waktu berkumpulnya air (time of concentration) pun menjadi jauh lebih pendek sehingga pada akhirnya akumulasi air hujan yang terkumpul melampaui kapasitas drainase yang ada.

Banyak kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air (retarding pond) dan bantaran sungai kini menjadi tempat hunian. Kondisi ini akhirnya akan meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal ini dapat dilihat dari air yang meluap dari saluran drainase, baik di perkotaan maupun di permukiman, yang menimbulkan genangan air atau bahkan banjir. Hal itu terjadi karena selama ini drainase difungsikan

untuk mengalirkan air hujan yang berupa limpasan (run-off) secepat-cepatnya ke penerima air/badan air terdekat.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur tersebut diperlukan sistem drainase yang berwawasan lingkungan dengan prinsip dasar mengendalikan kelebihan air permukaan sehingga dapat dialirkan secara terkendali dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Hal ini dimaksudkan agar konservasi air tanah dapat berlangsung dengan baik dan dimensi struktur bangunan sarana drainase dapat lebih efisien.

Prinsipnya, air hujan yang jatuh ditahan dulu agar lebih banyak yang meresap ke dalam tanah melalui bangunan resapan, baik buatan maupun alamiah seperti kolam tandon, sumur-sumur resapan, biopori, dan lain-lain. Hal ini dilakukan mengingat semakin minimnya persediaan air tanah dan tingginya tingkat pengambilan air.

Pengembangan prasarana dan sarana drainase berwawasan lingkungan ditujukan untuk mengelola limpasan permukaan dengan cara mengembangkan fasilitas untuk menahan air hujan sesuai dengan kaidah konservasi dan keseimbangan lingkungan. Konsep inilah yang ingin mengubah paradigma lama dalam pembangunan drainase khususnya di perkotaan.

Pelestarian prasarana dan sarana drainase mandiri berbasis masyarakat sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana dan sarana yang ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan prasarana dan

sarana serta penyuluhan dan pedoman pemeliharaan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

Masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sistem jaringan drainase melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Survei dan Investigasi : masyarakat dapat memberikan informasi calon lokasi yang akan dibangun dan kondisi setempat seperti kelayakan dari segi teknis dan ekonomi.
2. Tahap Perencanaan masyarakat dapat ikut serta dalam persetujuan, kesepakatan dan penggunaan dari perencanaan yang telah dibuat.
3. Tahap Pembebasan Lahan : masyarakat memberi kemudahan dan memperlancar proses pembebasan lahan apabila lahan masyarakat terkena dampak pembangunan.
4. Tahap Pembangunan masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan dan terlibat dalam pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan.
5. Tahap Operasi dan Pemeliharaan : masyarakat ikut serta aktif dalam pemeliharaan dan pengoperasian, melaporkan jika ada kerusakan.
6. Tahap Monitoring dan Evaluasi : masyarakat dapat memberikan data yang benar dan nyata sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek serta dampak yang ditimbulkannya.

Cara paling efektif agar drainase berwawasan lingkungan ini dapat berkelanjutan adalah peran serta masyarakat untuk ikut aktif di dalam penerapan pelestarian air tanah karena jika persediaan air tanah habis, merekalah yang paling merasakan akibatnya. Masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut menabung air melalui kolam tandon penampung air hujan, berupa reservoir bawah tanah maupun dengan tangki penampung yang berfungsi menampung dan mengalirkan air hujan yang jatuh dari permukaan tanah, bangunan, juga atap rumah.

#### **D. Pengertian Talud**

Dalam dunia proyek, talud bisa diartikan sebuah pasangan batu belah yang berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak longsor.

Talud adalah timbunan atau galian yang dibuat sedemikian rupa (biasanya miring membentuk tebing) yang fungsinya menahan air disungai supaya jangan melimpah. Fungsi lainnya adalah supaya tebing/lereng tidak mudah longsor dengan membentuk geometri tebing/lereng yang relatif landai.

Talud juga sebagai dinding saluran . Kemiringan talud adalah kemiringan dinding saluran yang dihitung dari perbandingan antara arah vertikal dan horizontal.

#### **E. Pengertian Perdesaan**

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antara masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga

masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan berbagai program. Di antaranya adalah Program Kompensasi Pengurangan subsidi bahan bakar Minyak di bidang Infrastruktur Pedesaan (PKPS-BBM) pada tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RISP) pada tahun 2006, Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) yang dimulai pada tahun 2007 sampai 2011. Pembangunan infrastruktur program pedesaan atau yang lebih dikenal sebagai PIIP berupaya menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok melalui partisipasi dalam memecahkan berbagai masalah .

Satuan Kerja Tingkat Provinsi Kegiatan PIIP di tingkat provinsi berada pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (dan Perbatasan) dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerjatersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU. PenyelenggaraanPIIP 2011 di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan PIIP (PPK PIIP). PPK PIIP tingkat provinsi bertugas mengelola anggaran PIIP 2011 di tingkat provinsi yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas dan fungsi PPK PIIP Tingkat Provinsi mengacu padaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2008, Tanggal11 Februari 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan KegiatanDepartemen Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri dan Pedoman Pelaksanaanini, SK Menteri PU dan Pedoman Pelaksanaan ini.

## **F. Pemberdayaan Masyarakat**

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

## 1. Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa "proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog".

Suriatman SKM (2005) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan



masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.

## **2. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat**

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Pengertian pemberdayaan masyarakat Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas

permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

### **3. Proses dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.

Pembangunan partisipatif mempunyai kaitan yang erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut merupakan salah satu wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005).

Sedangkan Mardikanto (2013) mendefinisikan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah :

“Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan”.

Filosofi pemberdayaan masyarakat dan paling banyak dikemukakan oleh berbagai pihak dan dalam banyak kesempatan dikutip oleh Kelsey dan Hearne (1995) bahwa “falsafah pemberdayaan masyarakat harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya Mardikanto dan Soebiato, 2013. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya.

Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu.

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people- centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan

sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan dan mempengaruhi kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parson et al. 1994 dalam Mardikanto 2010). Upaya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan potensi yang terpendam dalam masyarakat yang mengharuskan adanya fasilitator untuk membangun kapasitas produktif masyarakat .

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan
2. Menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan
3. Mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan. (Delivery dalam Sutrisno, 2005).

Pengorganisasian masyarakat sangat penting di dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat karena organisasi masyarakat

merupakan instrumen institusional dimana kinerja pembangunan dapat diukur dan berdasarkan tujuan awal program pemberdayaan, maka program atau usaha ini dapat dikatakan telah efektif dikarenakan telah mencapai salah satu tujuannya yakni keterlibatan masyarakat bawah dimulai dari keluarga, kekerabatan dan persaudaraan sehingga keefektifan pemberdayaan dapat dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran sudah melaksanakan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat berdasarkan analisis pengorganisasian masyarakat

### **G. Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya.

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen , yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk

3. Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan.

Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992) Adapun teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi menurut Suryana (2000) dapat dibagi dalam beberapa mashaab di antaranya :

### **1. Teori Klasik**

- a. **Adam Smith** beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan adanya penambahan penduduk maka akan terdapat penambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang

dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

b. **David Ricardo** berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemandegan (*stationary state*). Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation*.

## **2. Teori Neoklasik**

a. **Robert Solow** berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow penambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif.

b. **Harrord Domar** Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif, karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja

### **3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern (Rostow)**

Rostow *mengartikan* pembangunan ekonomi menurutnya bukan saja menyangkut perubahan dalam struktur ekonomi tetapi juga perubahan dalam struktur politik, struktur sosial, nilai sosial dan yang lainnya. Rostow mengemukakan ada 5 tahap dalam proses pembangunan yang akan dialami oleh setiap negara pada umumnya yaitu:

#### *1. The Traditional Society (Masyarakat Tradisional)*

Suatu kondisi dimana masyarakatnya masih memiliki cara berproduksi dan teknologi yang primitif dan berpikir irrasional.

#### *2. Precondition for take-off (Persyaratan Tinggal Landas)*

Masa transisi dimana masyarakatnya mempersiapkan diri atau dipersiapkan dari luar untuk berkembang.

#### *3. Take – off (Tinggal Landas)*

Masa dimana terjadi perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat, terciptanya kemajuan yang pesat dan terbentuknya pasar baru.

#### *4. The Drive to Manurity*

Masa dimana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.

#### *5. The Age of High Mass Consumption*

Masa dimana perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan lagi pada masalah produksi sehingga masyarakat bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dan sokogan politik.



#### **4. Hambatan-Hambatan Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan oleh suatu negara ternyata tidak semudah yang kita pikirkan terutama bagi negara-negara berkembang karena ada 3 masalah pokok yang harus di hadapi untuk mencapai pertumbuhan tersebut diantaranya :

1. Usaha untuk menaikkan tingkat pembentukan modal, salah satu usaha yang harus dilakukan sebuah negara berkembang untuk mencapai kemajuan ekonomi adalah menaikkan tingkat investasi. Karena kita ketahui bahwa negara berkembang adalah negara yang miskin modal begitu pun dengan teknologinya. Sehingga sangat sulit untuk memajukan ekonominya.
2. Pertumbuhan yang berimbang atau tidak berimbang, Masalah pokok yang kedua bagi sebuah negara sedang berkembang adalah keseimbangan yang harus dipelihara diantara berbagai sektor ekonomi. Haruskah perhatian khusus diberikan kepada sektor industri ataukah sektor pertanian? Ataukah negara berusaha mencapai pertumbuhan berimbang dimana semua sektor ekonomi berkembang bersama-sama secara berdampingan.
3. Kebijakan kependudukan, kita ketahui bahwa negara berkembang selalu diperhadapkan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran karena tidak terserap oleh perusahaan-perusahaan sehingga mempengaruhi masa depan suatu negara untuk maju.

Hampir semua negara sedang berkembang mempunyai perekonomian yang dualistis. Disatu pihak berekonomi pasar, dan dipihak lain berekonomi pertanian. Yang pertama berpusat di dekat kota dan yang lainnya di daerah pedesaan. Yang satu maju, yang lain kurang maju. Dengan berpusat di kota ekonomi pasar dengan segala fasilitas hidup seperti radio, mobil, bus, kereta api, telepon, gedung bioskop, gedung mewah, sekolah dan akademi. Ekonomi pertanian dalam hal ini sangat terbelakang, hanya dengan menggunakan fasilitas seadanya.

Kemudian sumber alam negara berkembang kurang terolah . Sumber alam suatu negara terbelakang disebut kurang terolah dalam arti sumber tersebut tidak atau kurang dimanfaatkan. Meskipun suatu negara miskin dalam sumber alam tetapi ada kemungkinan dimasa depan negara ini akan berubah menjadi pemilik sumber daya alam yang besar sebagai hasil penemuan sumber yang sekarang belum diketahui atau karena penggunaan sumber yang ada dengan cara baru.

## H. Tinjauan Empiris

No	Penulis, Judul	Metodologi Penelitian	Kesimpulan
1.	<p>Penulis : Bonar M Sinaga</p> <p>Judul : Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pendapatan Faktor Produksi Intra Dan Inter- Regional Kbi-Kti</p>	<p>Alat analisis : regresi linier berganda</p> <p>Variabel Penelitian ini menggunakan model Interregional Social Accounting Matrix. Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia (IRSAM KBI-KTI) dengan basis data tahun 2005. Model IRSAM tersebut disusun dengan terlebih dahulu menyusun <i>Interregional Input Output (IRIO)</i> KBI-KTI, kemudian disusun IRSAM KBI-KTI.</p>	<p>1. Kondisi eksisting nilai pengganda intraregional KBI dan KTI menggambarkan bahwa penambahan pendapatan tenaga kerja sebagai dampak pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan lebih banyak diserap oleh tenaga kerja yang berada di wilayah kota dibandingkan di wilayah desa. Kedua fakta ini sudah merupakan kondisi logis yang sering ditemukan pada setiap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini lebih terfokus di wilayah kota dibandingkan di desa, serta lebih banyak menyerap tenaga kerja operator, produksi, buruh kasar, dan profesional.</p> <p>2. Dampak pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di KTI terlihat lebih tinggi terhadap penambahan pendapatan tenaga kerja di KBI, dibandingkan di KBI ke KTI. Ada ketidakseimbangan efek pengganda interregional yang cukup mencolok di antara dua kawasan tersebut, atau dengan kata lain terjadi ketidakseimbangan <i>spill over effect</i> dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.</p> <p>3. <i>Spillover efect</i> pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan lebih diserap oleh tenaga kerja di kota dibandingkan tenaga kerja di desa, khususnya tenaga profesional, operator, dan buruh kasar. <i>Spillover effect</i> yang dihasilkan oleh KBI ke KTI</p>

			maupun oleh KTI ke KBI semuanya lebih besar mengarah kepada tenaga kerja di kota.
2.	<p>Penulis : Hengki Purwoto</p> <p>Judul : Kajian Dampak Infrastruktur Jalan Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pengembangan Wilayah</p>	<p>Alat Analisis : regresi linier berganda</p> <p>Studi ini menggunakan Variabel :</p> $Y = C + I + G + (X-M)$ $Y = f(K,L)$ $aK + bL = C + I + G + (X-M)$ <p>dengan:  C : konsumsi,  I : investasi,  G : pembelanjaan pemerintah,  (X-M) : ekspor netto,  K : kapital,  L : tenaga kerja.</p>	<p>Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi jalan di Jawa secara total memberikan dampak terbesar terhadap pengembangan ekonomi Lebih jauh, analisis memperlihatkan masing- masing jenis investasi penanganan jalan mempunyai pengaruh berbeda-beda terhadap perekonomian wilayah pada wilayah yang berbeda. Hasil analisis memperlihatkan bahwa pengaruh penanganan jalan adalah berbeda-beda untuk tiap jenis penanganan. Kebijakan saat ini yang menggabungkan anggaran pembangunan dan peningkatan jalan menimbulkan kesulitan dalam menentukan pengaruh masing-masing jenis investasi terhadap perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan identifikasi dan pemisahan yang jelas antara anggaran pembangunan dan peningkatan jalan,</p>
3.	<p>Penulis : Youdhi Permadi Ma'ruf</p> <p>Judul : Pengaruh Investasi Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Pesisir Selatan</p>	<p>Alat analisis : Variabel bebas dan Variabel Tertikat</p> <p>Studi ini menggunakan Variabel :</p> $Y = PDB/PDRB$ <p>(indikator pertumbuhan ekonomi)</p>	<p>Dampak investasi jalan di daerah yang berbeda adalah berbeda baik dalam magnitude maupun dalam pergerakan tahunannya. Hal ini akan membawa implikasi kebijakan yang dilematis antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pengalokasian anggaran di daerah maju dan tertinggal. <i>Trade-off</i> antara target pertumbuhan dan pemerataan dalam investasi jalan</p>

		<p>a, b1, b2, b3 = konstanta regresi x1, x2, x3 = indikator-indikator infrastruktur bidang pekerjaan umum yang berpengaruh.</p>	<p>harus benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 1. Hasil analisis trend dan korelasi dalam kurun waktu 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan lima variabel infrastruktur pekerjaan umum. Lima variabel infrastruktur pekerjaan umum tersebut yaitu: (a) Total Panjang Jalan dan Jembatan, (b) Total Jalan Mantap, (c) Luas Areal Teririgasi, (d) Suplai Air Minum, (e) Pelayanan Sampah. . 2. Berdasarkan analisis regresi (dengan tingkat signifikansi 0.05), diketahui bahwa dua indikator infrastruktur jalan, yaitu Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan, serta Total Jalan Mantap, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap delapan macam indikator pertumbuhan ekonomi, yaitu: (a) Jasa, (b) Transportasi dan Komunikasi, (c) Industri Pengolahan, (d) Pertambangan dan Penggalian, (e) Konstruksi/Bangunan, (f) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, (g) Listrik, Gas, dan Air Bersih, serta (h) Perdagangan, Hotel, dan Restoran. 3. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan hasil kontribusi bersama-sama antara infrastruktur Jalan dan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur Sumber Daya Air serta infrastruktur</p>
--	--	---	--



### **III . METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sumber Data**

Data adalah suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. Data yang diperlukan adalah data yang mendukung penelitian, yaitu proses implementasi PPIP Mandiri Perkotaan di pesawaran.

Adapun data yang digunakan adalah:

- Data sekunder

Data ini diperoleh dari dokumen, laporan, peraturan perundangan dari lembaga terkait seperti Dinas PU Pesawaran , Bappeda Pesawaran dan Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung yang berkaitan dengan PPIP Mandiri Perkotaan di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel, dan bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung juga digunakan

Tabel 6. Variabel , Simbol Dan Satuan Yang Digunakan

No	Variabel	Simbol
1	Pertumbuhan Ekonomi	Y
2	Pembangunan Infrastruktur Jalan (m)	PMB
3	Drainase (m)	DRS
4	Talud (m)	TLD

Pada tabel 6 dapat dilihat Variabel ,simbol dan satuan yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana Pertumbuhan Ekonomi adalah Y, Pembangunan Infrastruktur Jalan adalah PMB , Drainase adalah DRS , dan yang terakhir Talud adalah TLD .

## **B. Definisi Operasional Variabel**

### **1. Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Variabel pertumbuhan Ekonomi menggunakan data PDRB di Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2009-2015 .

### **2. Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Variabel Pembangunan Infrastruktur yang akan diteliti adalah pembangunan infrastruktur jalan yang di lakukan di Kabupaten pesawaran. Variabel Pembangunan infrastruktur jalan dalam penelitian ini menggunakan satuan meter (m) dari tahun 2009-2015

### **3. Pembangunan Infrastruktur Drainase**

Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat . Variabel pembangunan



infrastruktur Drainase dalam penelitian ini menggunakan satuan meter (m) dari Tahun 2009-2015.

#### **4. Pembangunan Infrastruktur Talud**

Talud bisa diartikan sebuah pasangan batu belah yang berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak longsor. Variabel Talud dalam penelitian ini menggunakan data Pembangunan talud di Kabupaten Pesawaran dari Tahun 2009-2015 .

#### **C. Model Dan Metode Analisis**

Berdasarkan uraian yang ada sebelumnya, maka model yang digunakan adalah model regresi linier berganda OLS (*Ordinary Least Square Method*)

Secara eksplisit dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Pmb} + \beta_2 \text{Drs} + \beta_3 \text{Tld} + \text{Et}$$

dimana :

Y = Pertumbuhan Ekonomi

PMB = Pembangunan Jalan

DRS = Drainase

TLD = Talud

Et = Error term

Keterangan :

Log Y : Logaritma Pertumbuhan Ekonomi (rupiah)

Log PMB	: Logaritma Pembangunan Jalan (m)
Log DRS	: Logaritma Pembangunan Drainase (m)
Log TLD	: Logaritma Pembangunan Talud (m)
0	: Konstanta
1, 2, 3	: Koefisien regresi

#### D. Uji Asumsi Klasik :

##### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas menurut Gujarati (2010) adalah untuk mengetahui apakah residual terdistribusi secara normal atau tidak, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode Jarque-Bera. Residual dikatakan memiliki distribusi normal jika Jarque Bera  $> Chi\ square$ , dan atau probabilitas ( $p\text{-value}$ )  $> = 5\%$  (Gujarati, 2010).

Ho : Jarque Bera stat  $> Chi\ square$ ,  $p\text{-value} > 5\%$ , residual berdistribusi dengan normal

Ha : Jarque Bera stat  $< Chi\ square$ ,  $p\text{-value} < 5\%$ , residual tidak berdistribusi dengan normal.

Kriteria pengujiannya adalah :

1. Jika Jarque Bera stat  $> Chi\ square$ ,  $p\text{-value} > 5\%$  maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya residual berdistribusi dengan normal
2. Jika Jarque Bera stat  $< Chi\ square$ ,  $p\text{-value} < 5\%$  maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya residual tidak berdistribusi dengan normal.

## 2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian dari residual model regresi yang digunakan dalam penelitian tidak homokedastis atau dengan kata lain tidak konstan. Data yang diambil dari pengamatan satu ke lain atau data yang diambil dari observasi satu ke yang lain tidak memiliki residual yang konstan atau tetap. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat digunakan metode uji *White*. Uji keberadaan heteroskedastisitas dilakukan dengan menguji residual hasil estimasi menggunakan metode *White Heteroskedasticity Test (No Cross Term)* dengan membandingkan nilai *Obs\*R square* dengan nilai *Chi-square*. Jika  $Obs*R\ square\ (^2\text{-hitung}) > Chi\text{-square}\ (^2\text{-tabel})$ , berarti terdapat masalah heteroskedastisitas didalam model. Dan jika  $Obs*R\ square\ (^2\text{-hitung}) < Chi\text{-square}\ (^2\text{-tabel})$ , berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas (Gujarati, 2010). Dalam hal ini, hipotesis pendugaan masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

$H_0$  :  $Obs*R\ square\ (^2\text{-hitung}) > Chi\text{-square}\ (^2\text{-tabel})$  maka mengalami masalah heteroskedastisitas.

$H_a$  :  $Obs*R\ square\ (^2\text{-hitung}) < Chi\text{-square}\ (^2\text{-tabel})$ , Model terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Kriteria pengujiannya adalah :

1. Jika  $Obs*R\ square\ (^2\text{-hitung}) > Chi\text{-square}\ (^2\text{-tabel})$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya mengalami masalah heteroskedastisitas
2. Jika  $Obs*R\ square\ (^2\text{-hitung}) < Chi\text{-square}\ (^2\text{-tabel})$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya terbebas dari masalah heteroskedastisitas

### 3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain tidak saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dalam model analisa regresi dilakukan dengan pengujian *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* dengan membandingkan nilai *Obs\*R square* dengan nilai *Chi-square*. Jika  $\text{Obs}^*\text{R square} (\chi^2\text{-hitung}) > \text{Chi-square} (\chi^2\text{-tabel})$ , berarti hasil uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* mengindikasikan bahwa terdapat masalah autokorelasi didalam model. Dan jika  $\text{Obs}^*\text{R square} (\chi^2\text{-hitung}) < \text{Chi-square} (\chi^2\text{-tabel})$ , berarti hasil uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* mengindikasikan bahwa tidak ada masalah autokorelasi (Gujarati, 2010). Dalam hal ini, hipotesis pendugaan masalah autokorelasi adalah sebagai berikut :

$H_0$  :  $\text{Obs}^*\text{R square} (\chi^2\text{-hitung}) > \text{Chi-square} (\chi^2\text{-tabel})$  maka mengalami masalah autokorelasi.

$H_a$  :  $\text{Obs}^*\text{R square} (\chi^2\text{-hitung}) < \text{Chi-square} (\chi^2\text{-tabel})$  maka terbebas dari masalah autokorelasi.

Kriteria pengujiannya adalah :

1. Jika  $\text{Obs}^*\text{R square} (\chi^2\text{-hitung}) > \text{Chi-square} (\chi^2\text{-tabel})$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya mengalami masalah autokorelasi
2. Jika  $\text{Obs}^*\text{R square} (\chi^2\text{-hitung}) < \text{Chi-square} (\chi^2\text{-tabel})$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya terbebas dari masalah autokorelasi

#### 4. Multikolinearitas

Multikolinearitas menurut Gujarati (2010) adalah hubungan linier yang terjadi diantara variabel-variabel independen, meskipun terjadinya multikolinearitas tetap menghasilkan estimator yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dari hasil estimasi. Jika  $VIF < 5$  maka antara variabel independen tidak terjadi hubungan yang linier atau tidak ada multikolinearitas. Dalam buku Gujarati (2010), cara menghitung VIF adalah sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1 - r_{23}^2)}$$

VIF menunjukkan bagaimana varians dari sebuah estimator ditingkatkan oleh keberadaan multikolinearitas. Seiring dengan  $r_{23}^2$  mendekati 1, VIF mendekati tidak terhingga. Hal tersebut menunjukkan sebagaimana jangkauan kolinearitas meningkat, varians dari sebuah estimator juga meningkat, dan pada suatu nilai batas dapat menjadi tidak terhingga.

$H_0$  :  $VIF > 10$ , terdapat multikolinearitas antar variabel bebas

$H_a$  :  $VIF < 10$ , tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas

Kriteria pengujiannya :

- (1) Jika  $VIF > 10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat multikolinearitas antar variabel bebas
- (2) Jika  $VIF < 10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas

## E. Pengujian Hipotesis

### 1. Uji t statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat (Gujarati, 2010). Cara menghitung uji t statistik adalah :

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_{\bar{x}}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Dimana :

$\bar{x}$  = rata-rata dari seluruh sampel

$\mu_0$  = rata-rata x

$\sigma$  = simpangan baku

n = jumlah sampel

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_1 \leq 0$  artinya pembangunan jalan tidak berpengaruh terhadap Y

$H_a : \beta_1 > 0$  ;artinya pembangunan jalan berpengaruh positif terhadap Y

$H_0 : \beta_2 \leq 0$  artinya drainase tidak berpengaruh terhadap Y

$H_a : \beta_2 > 0$  ;artinya drainase berpengaruh positif terhadap Y

$H_0 : \beta_3 \leq 0$  artinya talud tidak berpengaruh terhadap Y

$H_a : \beta_3 > 0$  ;artinya talud berpengaruh positif terhadap Y

Kriteria pengujiannya adalah:

- (1) Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Pembangunan Infrastruktur Jalan , Pembangunan Infrastruktur Drainase dan Pembangunan Infrastruktur Talud berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

- (2) Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya Pembangunan Infrastruktur Jalan , Pembangunan Infrastruktur Drainase dan Pembangunan Infrastruktur Talud tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

## 2. Uji F Statistik

Menurut Gujarati (2010) bahwa pengujian ini kan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara menghitung uji F statistik adalah :

$$F_{\alpha(v_1, v_2)} = \frac{1}{F_{\alpha(v_1, v_2)}}$$

Dimana untuk menentukan nilai F, terlebih dahulu harus diketahui nilai  $v_1$  dan  $v_2$  serta nilai  $\alpha$  yaitu tingkat keyakinan sebesar  $10\% = 0,10$ .

Hipotesis yang digunakan :

$H_0 : \beta_i = 0$  ; Pembangunan Infrastruktur Jalan , Drainase dan Talud tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

$H_a : \beta_i \neq 0$  ; Pembangunan Infrastruktur Jalan , Drainase dan Talud berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kriteria pengujiannya adalah:

1. Jika  $F\text{ hitung} < F\text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya Pembangunan Infrastruktur Jalan , Pembangunan Infrastruktur Drainase dan Pembangunan Infrastruktur Talud secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya Pembangunan Infrastruktur Jalan , Pembangunan Infrastruktur Drainase dan Pembangunan Infrastruktur Talud secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### F . Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pesawaran



Sumber : BPS Pesawaran  
Gambar 2 Peta Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran merupakan sebuah kabupaten yang sangat muda dan merupakan daerah pemekaran kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten tersebut dapat lahir setelah melalui perjuangan pembentukan kabupaten dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pada tahun 1968, dimulai dengan usulan pemekaran Kabupaten Lampung Selatan menjadi

3 (tiga) kabupaten yaitu :



1.Kabupaten Tanggamus dengan ibukota di Kota Agung, yang telah eksis pada tahun 1997,

2.Kabupaten Rajabasa dengan ibukota di Kalianda, dan

3.Kabupaten Pesawaran dengan ibukota di Gedong Tataan.

Selanjutnya dalam kurun era dan semangat reormasi dan desentralisasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan di belahan barat melanjutkan perjuangan pendahulunya dengan melakukan terobosan guna terwujudnya Kabupaten Pesawaran melalui proses yuridis formal dengan Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) yang tertuang dalam SK. Nomor : 021/P3KP/PPK/IV/2001, hingga akhirnya terbentuklah Kabupaten Pesawaran melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2007, dengan hari jadi dengan ditandai peresmian oleh Menteri Dalam Negeri Pada Tanggal 2 November 2007. Kabupaten Pesawaran terdiri dari 7 (tujuh kecamatan), yakni Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng .

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji statistik secara parsial yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel pembangunan jalan dan talud berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pesawaran , sedangkan variabel drainase berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pesawaran .
2. Berdasarkan uji statistik secara keseluruhan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel pembangunan jalan, drainase dan talud berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten pesawaran .

### **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah (Pemda) lebih memperhatikan dan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan investasi khususnya di bidang infrastruktur, khususnya melalui kerjasama baik dengan antar pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/kota), swasta (nasional/asing), maupun masyarakat umum. Penyediaan infrastruktur yang baik terbukti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara

positif, sehingga pembangunan ekonomi akan merata di setiap daerahnya dengan adanya dukungan infrastruktur yang memadai

2. Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur lainnya selain pembangunan infrastruktur drainase, karena selama pembangunan drainase di Kabupaten Pesawaran ini tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesawara.
3. Sebaiknya Pemerintah Daerah lebih mengedepankan pembangunan talud agar dapat ditingkatkan lagi kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas Talud yang baik akan dapat membantu masyarakat dengan cara menghindari musibah longsor yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditakutkan akan memperburuk keadaan ekonomi .Karena terbukti dengan adanya pembangunan Talud dapat meningkatkan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1976 -2011*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Pesawaran dalam angka Tahun 2008-2009-2011-2014*
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. 2015. *Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2008-2013*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2015. *Tingkat KemiskinanPesawaranTahun 2007, 2010, 2011*.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu ekonomi, Edisi 1, Cetakan Ke 5*. Jogyakarta: BPFE.
- Chambers, R., 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Dalam Kartasasmita, G., 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Cides. Jakarta.
- Dienyah, Firdha . 2016 . *Kontribusi Infrastruktur Terhadap PDRB Provinsi di Pulau Sumatera*. Skripsi. FEB Unila
- Gujarati, Damondar N. 2010.*Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi kelima*. Jakarta: Salemba Empat
- Ife J. 1995. *Community Development: creating community alternatives – vision analysis and practice*. Melbourne: Longmen Australia Pty Ltd.
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika.
- Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Joseph ,1999 . *The Theory of Economic Development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle*, Cambridge;Harvard University Press

- Kelsey, L.D. 1985, *Cooperative Extension Work*, New York:Comstock Publishing Associates, Ithaca.
- Lewis, Arthur. 1996. *Development Planning*, New York:Oxford University
- Mardikanto T dan Soebiato P, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Mardikanto, Totok.dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- M.H.M, Sibarani. 2002. Kontribusi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana.
- Myrdal, Gunnar. 1997. *Economic Theory and Underdeveloped Regions*, New York: Harper
- Payne, M. 1997. *Social Work and Community Care*. London: McMillan.
- Pranarka, A. M. W. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Prof.Simon Kuznets. 1990. *Modern Economic Growth, Rate, Stucture And Spread* , United States: John Hopkins University
- Randy, Wrihatnolo dan Riant Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Pengantara dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Alfabeta
- Robinson, J.R. 1994. *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Suriatman, S.K.M. 2005. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Yudhistira.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutopo H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Sutrisno. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : CV. Citra Utama.

Tatang M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

Universitas Indonesia, Jakarta. Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media

Zaki, Mubaroh. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota*. Jurnal Ilmiah. Universitas Diponegoro, Semarang.